



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Taman Suropati Nomor 2, Jakarta 10310
Telepon (021) 31936207, 3905650; Faksimile (021) 3145374
www.bappenas.go.id

Nomor : 16915/PP.04.02/Dt.2.4/B/12/2021 Jakarta, 21 Desember 2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Narasumber Penanggap pada
Diseminasi Hasil Kajian Sinergi Proyek Prioritas
Daerah dan Pembangunan IKN Baru

Yth. Drs. Martinus Nanang, M.A.
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Mulawarman
di Tempat

Sehubungan dengan persiapan pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur, Kementerian PPN/Bappenas menyusun kajian "Sinergi Proyek Prioritas Daerah dan Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Baru". Berkenaan dengan hal tersebut, kami memohon kesediaan Bapak untuk hadir secara virtual/*online* dan menjadi **narasumber penanggap** dalam pertemuan diseminasi hasil kajian yang akan diselenggarakan pada:

hari, tanggal : Kamis, 23 Desember 2021
waktu : 13.00-15.00 WIB / 14.00-16.00 WITA
tempat : Ruang rapat virtual melalui aplikasi *Zoom Meeting*
Meeting ID: 631 059 4607
Password: MitraIKN

Terlampir kami sampaikan *term of reference* (TOR) dan *draft* hasil kajian dalam bentuk paparan (dapat diakses pada <https://link.bappenas.go.id/diseminasihasilmitraIKN>) sebagai acuan. Sekiranya diperlukan informasi dan komunikasi lebih lanjut, kami menugaskan staf Sdr. Mutia Vegadianti (+6282121098947) untuk dapat berkoordinasi dengan staf Bapak.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kesediaan Bapak, kami mengucapkan terima kasih.

Tembusan :

Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas (sebagai laporan)



Lampiran Surat

Nomor : 16915/PP.04.02/Dt.2.4/B/12/2021

Tanggal : 21 Desember 2021

Hal : Permohonan Narasumber Penanggap pada
Diseminasi Hasil Kajian Sinergi Proyek
Prioritas Daerah dan Pembangunan IKN Baru

TERM OF REFERENCE

Diseminasi Hasil Kajian

Sinergi Proyek Prioritas Daerah dan Pembangunan IKN Baru

Kamis, 23 Desember 2021

I. Latar Belakang

Kalimantan Timur terpilih menjadi lokasi untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru, tepatnya di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Rencana pengembangan IKN memberikan peluang yang besar terhadap pengembangan wilayah di Kalimantan Timur. Pembangunan kawasan IKN diharapkan dapat menjadi penggerak pertumbuhan baru dengan menciptakan kesempatan kerja baru dan peluang investasi yang akan memberikan efek pengganda besar terhadap perekonomian wilayah. Kegiatan investasi di kawasan IKN akan meningkatkan perdagangan antar wilayah dan aktivitas ekonomi di Provinsi Kalimantan timur, Pulau Kalimantan, dan kawasan Timur Indonesia. Struktur ekonomi Provinsi Kalimantan Timur akan mengalami transisi dari ekonomi berbasis sumber daya alam menjadi ekonomi berbasis layanan dan manufaktur. Tentunya, dampak jangka panjang yang diharapkan adalah PDRB Provinsi Kalimantan Timur akan meningkat.

Hubungan timbal balik yang saling menguatkan antara IKN dan daerah sekitarnya sangat diharapkan sehingga daerah mitra sekitar dapat ikut maju dan berkembang seiring dengan perkembangan IKN sebagai pusat pemerintahan nasional. Daerah mitra sekitar, yaitu Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kabupaten Kutai Kartanegara yang juga direncanakan sebagai *superhub* di Kalimantan Timur juga akan berperan sebagai mitra kolaborasi dalam pencapaian target-target pembangunan IKN atau *Key Performance Indicator* (KPI) yang ditetapkan. Target pembangunan tersebut dirumuskan berdasarkan 8 (delapan) prinsip, yaitu 1) Mendesain sesuai kondisi alam termasuk memprioritaskan kawasan lindung dan ruang hijau; 2) Menciptakan keharmonisan dan keunikan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika; 3) Mewujudkan kemudahan akses dan kecepatan, serta memprioritaskan mobilitas aktif penduduk; 4) Mewujudkan kota hemat energi, pemanfaatan energi terbarukan dan rendah emisi karbon; 5) Mewujudkan infrastruktur perkotaan dengan sistem sirkuler dan tangguh; 6) Menciptakan kota yang aman, nyaman, dan terjangkau; 7) Menciptakan kota yang nyaman dan efisien untuk tata kelola pemerintahan, bisnis dan penduduk melalui informasi, komunikasi, dan teknologi; dan 8) Menciptakan kota dengan peluang ekonomi untuk semua, sehingga terwujud pendapatan per kapita yang tinggi, serta rendahnya kesenjangan ekonomi. Pada prinsipnya, dukungan daerah mitra terhadap pencapaian target-target tersebut tidak hanya memberikan dampak yang positif bagi pembangunan IKN melainkan juga bagi peningkatan kesejahteraan dan daya saing daerah itu sendiri. Oleh karena itu, daerah mitra akan didorong untuk memiliki strategi pembangunan yang mempertimbangkan IKN sebagai pusat pertumbuhan baru, khususnya di Kalimantan Timur.

Kementerian PPN/Bappenas melalui Kedeputusan Bidang Pengembangan Regional melakukan kajian kesiapan daerah mitra dalam mendukung pembangunan IKN di Provinsi Kalimantan Timur yang bertujuan untuk menghasilkan usulan strategi pembangunan bagi daerah mitra IKN. Identifikasi potensi daerah dalam mendukung pembangunan IKN menjadi langkah penting dalam proses perumusan strategi tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini juga menjadikan proses pembangunan IKN menjadi lebih partisipatif dan tidak meninggalkan daerah mitra di sekitarnya,

Untuk mendapatkan informasi terkait potensi daerah, tim kajian telah melakukan beberapa tahap kajian di antaranya:

- 1) Studi literatur dan analisis awal;
- 2) Temu pakar;
- 3) *Focus Group Discussion* (FGD);
- 4) Penjaringan data primer dan sekunder;
- 5) Wawancara mendalam (deep interview); dan
- 6) Penyusunan indikator dan analisis lanjutan.

Tahap selanjutnya dalam kajian ini adalah diseminasi sebagai bentuk verifikasi dan pemaparan hasil analisis. Dalam diseminasi ini diharapkan para peserta baik dari pemerintah daerah, kementerian/ Lembaga, akademisi dan pihak lain yang terkait dapat memberikan tanggapan sesuai bidang masing-masing. Tanggapan tersebut akan menjadi bagian penting dalam penyempurnaan laporan kajian yang nantinya akan dijadikan masukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah mitra. Hal ini sejalan dengan keluaran utama yang ingin dicapai dari kajian ini yaitu sebagai *policy brief*.

II. Tujuan

Diseminasi hasil kajian ini bertujuan untuk:

- 1) Menyebarkan informasi yang diperoleh dari hasil kajian yang telah dilaksanakan; serta
- 2) Memperoleh konfirmasi dan timbal balik dari seluruh peserta yang terlibat agar hasilnya dapat lebih baik dan dapat diimplementasikan.

III. Garis Besar Materi/Tanggapan dari Narasumber Penanggung

Dalam temuan kajian ini terdapat berbagai temuan dukungan yang berbeda-beda dari setiap daerah. Materi atau tanggapan dari narasumber yang diharapkan dapat memperkaya temuan dan narasi *policy brief* dari kajian ini antara lain:

- 1) Perspektif Pengembangan Wilayah dan Kawasan

Pada perspektif ini diharapkan tanggapan dan masukan terhadap bentuk rekomendasi kebijakan dan strategi pengembangan wilayah pada daerah mitra berdasarkan hasil kajian agar tidak menimbulkan ketimpangan dan dapat mendukung pencapaian target pembangunan IKN. Diharapkan juga masukan berupa usulan kebijakan dan strategi pengembangan wilayah dalam rangka meningkatkan kesiapan daerah mitra untuk bisa ikut berperan pada pembangunan IKN.

- 2) Perspektif Sosial dan Ketenagakerjaan

Pada perspektif ini diharapkan tanggapan dan masukan terhadap bentuk rekomendasi kebijakan dan strategi pembangunan sosial dan ketenagakerjaan pada daerah mitra berdasarkan hasil kajian agar dapat mendukung pencapaian target pembangunan IKN. Diharapkan juga masukan berupa usulan kebijakan dan strategi sosial dan ketenagakerjaan yang perlu menjadi prioritas dalam rangka meningkatkan kesiapan daerah mitra untuk bisa ikut berperan pada pembangunan IKN.

- 3) Perspektif Perencanaan Pembangunan Daerah

Pada perspektif ini diharapkan tanggapan dan masukan terhadap bentuk rekomendasi kebijakan dan strategi pengembangan daerah mitra yang telah disusun berdasarkan hasil kajian dengan kesesuaiannya terhadap perencanaan pembangunan daerah.

IV. Peserta Undangan

Kementerian/Lembaga

1. Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR;
2. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian LHK;

3. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementan;
4. Staf Ahli Menteri ATR Bidang Pengembangan Kawasan, Kementerian ATR/BPN;
5. Plt. Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN
6. Direktur Bina Penataan Bangunan, Kementerian PUPR;
7. Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, Kementerian LHK;
8. Direktur Kawasan Perkotaan dan Batas Negara, Kementerian Dalam Negeri;
9. Plt. Direktur Perencanaan Tata Ruang Nasional, Kementerian ATR/BPN;

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

1. Sekretaris Daerah;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat;
4. Dinas Lingkungan Hidup;
5. Dinas Perhubungan;
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Balai Wilayah Sungai Kalimantan III;

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

1. Sekretaris Daerah;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
4. Dinas Lingkungan Hidup;
5. Dinas Ketahanan Pangan;
6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
7. Dinas Kehutanan, Perkebunan, dan Pertambangan;
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Kelautan;

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

1. Sekretaris Daerah;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Dinas Pertanian dan Peternakan;
5. Dinas Kelautan dan Perikanan;
6. Dinas Perhubungan;
7. Dinas Pekerjaan Umum;
8. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
9. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;
12. Dinas Pariwisata;

Pemerintah Kota Balikpapan

1. Sekretaris Daerah;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan;
3. Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;
4. Dinas Pekerjaan Umum;
5. Dinas Perhubungan;
6. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perindustrian;
7. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu;
8. Dinas Ketenagakerjaan;

Pemerintah Kota Samarinda

1. Sekretaris Daerah;

2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Dinas Perhubungan;
5. Dinas Kebudayaan;
6. Dinas Pariwisata;
7. Dinas Perdagangan;
8. Dinas Perindustrian;
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;

Kementerian PPN/Bappenas

1. Deputi Bidang Ekonomi;
2. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan;
3. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan;
4. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana;
5. Plt. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam;
6. Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan;
7. Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;
8. Ir. Hayu Parasati, MPS., Perencana Ahli Utama;
9. Dr. Ir. Oswar Muadzin Mungkasa, MURP., Perencana Ahli Utama;
10. Direktur Pembangunan Daerah;
11. Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana;
12. Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter;
13. Direktur Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif;
14. Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik;
15. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air;
16. Direktur Lingkungan Hidup;
17. Direktur Perumahan dan Permukiman;
18. Direktur Transportasi;
19. Direktur Pengairan dan Irigasi;
20. Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Informatika;
21. Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial;
22. Direktur Ketenagakerjaan;
23. Direktur Aparatur Negara;
24. Direktur Pengembangan Pendanaan Pembangunan;
25. Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan;
26. Plt. Direktur Regional II;
27. Plt. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional;
28. Bapak Sidik Pramono, Ketua Tim Komunikasi dan Kehumasan IKN; dan
29. Dr. Ir. Imron Bulkin, MRP.

V. Susunan Acara

Waktu (WITA)	Deskripsi Kegiatan	Keterangan
13.30-14.00	Registrasi peserta	Peserta mengisi daftar hadir <i>online</i>
14.00-14.15	Sambutan Pembuka	Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas
14.15-14.45	Paparan: Hasil Kajian Sinergi Proyek Prioritas Daerah dan Pembangunan IKN Baru	Penyampaian oleh Tim TA Kajian Moderator: Plt. Direktur Regional II Kementerian PPN/Bappenas

Waktu (WITA)	Deskripsi Kegiatan	Keterangan
14.45-15.00	Tanggapan oleh Narasumber Penanggap ke-1 dari perspektif pengembangan wilayah dan kawasan	Bapak Ridwan Sutriadi, ST., MT., Ph.D Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK) ITB
15.00-15.15	Tanggapan oleh Narasumber Penanggap ke-2 dari perspektif sosial dan ketenagakerjaan	Bapak Drs. Martinus Nanang, M.A. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Mulawarman
15.15-15.30	Tanggapan oleh Narasumber Penanggap ke-3 dari persepektif perencanaan pembangunan daerah	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
15.30-15.55	Sesi Diskusi dan Tanya-Jawab	Seluruh peserta
15.55-16.00	Penutup	Dipandu oleh Tim TA Kajian